



AGILE GOVERNANCE DALAM PROGRAM SAKTI (SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI) PADA SATUAN KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) KLATEN

AGILE GOVERNANCE IN THE SAKTI PROGRAM (AGENCY-LEVEL FINANCIAL APPLICATION SYSTEM) IN THE WORK UNIT OF THE STATE TREASURY SERVICE OFFICE (KPPN) KLATEN

Sekar Ayu Islami¹, Lena Satlita¹

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:
Diterima 05-10-2023
Diperbaiki 19-10-2023
Disetujui 26-10-2023

Kata Kunci:
Agile governance, SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), satuan kerja

Keywords:
Agile governance, SAKTI (Agency Level Financial Application System), work unit

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui agile governance dalam program SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten. Agile governance dalam tata kelola keuangan diharapkan dapat memberikan respon yang gesit dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan yang dinamis melalui pemanfaatan teknologi saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa agile governance dalam program SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten telah berjalan dengan baik. Prinsip good enough governance, program SAKTI telah menyesuaikan konteks dan kapabilitas satuan kerja. Business driven, pelaksanaan SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten telah berorientasi pada proses bisnisnya. Human focused, telah adanya ruang partisipasi dan kontribusi pegawai operator pada satuan kerja. Based on quick wins, dalam pelaksanaan aplikasi ini telah terdapat inovasi yang dapat mempercepat target dan menciptakan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan. Systematic and adaptive approach, pelaksanaan SAKTI pada satuan kerja dapat dilakukan secara sistematis dan adaptif. Simple design and continuous refinement, terdapat aspek kesederhanaan dan perkembangan SAKTI secara berkelanjutan.

ABSTRACT

This research aims to determine the agile governance in the Agency Level Financial Application System program in the Klaten KPPN work unit. Agile governance in financial governance is expected to provide an agile and sustainable response in the face of dynamic changes through the use of current technology. This research applied qualitative research methods through a descriptive approach. In this research, the data validation technique used was the source triangulation technique. The results of this research indicate that agile governance in the SAKTI program has been well implemented in the Klaten KPPN work unit. The principle of good enough governance, the SAKTI program has adjusted the context and capabilities of the work unit. Business driven, the implementation of SAKTI program in the Klaten KPPN work unit has been oriented towards its business processes. Human focused, there is room for participation and contribution of operator employees in the work unit. This application's installation has included innovations based on quick wins that help advance goals and result in financial management success. Systematic and adaptive approach, SAKTI can be implemented in the work unit in a systematic and adaptive manner. Aspects of SAKTI's simplicity and continual evolution include simple design and

1. Pendahuluan

Perkembangan Sistem Informasi (SI) dewasa ini mendorong adanya perubahan pada kehidupan manusia, termasuk dalam aspek kemudahan, kecepatan, serta keefektifan aktivitas manusia. Misalnya, pada proses penyimpanan data, pengumpulan data, pencarian data, pengolahan data, hingga penyampaian informasi (Rusdiana, 2014:201).

Sistem Informasi memiliki peranan yang krusial dalam mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui pengaruh tersebut, tentunya akan terjadi adanya peningkatan produktivitas, mengurangi adanya resiko human error, serta mengurangi duplikasi pekerjaan. Perubahan pada proses pelayanan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi saat ini bukan merupakan suatu kebutuhan, melainkan telah menjadi suatu tuntutan.

Pemenuhan kebutuhan atas peningkatan efisiensi, layanan publik, dan kesejahteraan publik dapat diciptakan melalui tata kelola pemerintahan yang gesit (*agile governance*). Paradigma *agile governance* mendorong sistem birokrasi atau kegiatan pemerintahan untuk bekerja lebih secara lebih adaptif terhadap perubahan, fleksibel, efisien, dan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi (Abdoellah & Rustiana, 2016:91).

Selain itu, penerapan *agile governance* pada suatu organisasi publik dapat mengefisienkan biaya dan mengeksplorasi seluruh peluang yang ada (Huang & Pang, 2014:463-465). Salah satunya pada pengelolaan keuangan negara di Indonesia, penerapan *agile governance* khususnya pada pemanfaatan sistem informasi dibutuhkan dengan tujuan untuk menghindari permasalahan yang timbul akibat penggunaan sistem yang terpisah dan manual.

Dalam upaya memenuhi tuntutan di era digital saat ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia menciptakan sistem aplikasi yang terintegrasi yang ditujukan untuk satuan kerja (satker). Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) merupakan unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki tugas dan fungsi yang krusial dalam pengelolaan keuangan negara, yakni mengatur pelaksanaan anggaran APBN dan APBD mulai dari tahap perencanaan, pencairan, monitoring, pelaporan, serta evaluasi penggunaan anggaran. Sistem aplikasi yang terintegrasi tersebut disebut dengan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi).

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, SAKTI merupakan bagian dari program pengelolaan keuangan negara yang didefinisikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran keuangan dalam pendapatan serta belanja negara pada instansi pemerintahan (satuan kerja). Harapan dari diterapkannya SAKTI pada pengelolaan keuangan negara, khususnya KPPN Klaten adalah adanya operasional pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, adanya efisiensi sumber daya, baik dari aspek anggaran maupun sumber daya manusia.

Pelaksanaan pelatihan End User Training (EUT) SAKTI pada wilayah satuan kerja KPPN Klaten masih ditemukan beberapa hambatan. Hambatan yang terjadi

dari sisi aplikasi SAKTI ditemukan sistem yang melambat akibat digunakan oleh banyak user karena aplikasi masih belum stabil. Selain itu, ketersediaan jumlah sumber daya manusia, khususnya trainer SAKTI masih terbatas, yakni hanya dua pegawai dari KPPN Klaten untuk melakukan training kepada 74 satuan kerja KPPN Klaten. Keterbatasan tersebut berakibat pada kurang optimalnya pelatihan EUT SAKTI.

Ditemukan beberapa kekurangan aplikasi SAKTI, diantaranya pengaruh ketergantungan terhadap jaringan internet pada implementasi SAKTI, koneksi dan fleksibilitas yang kurang dan berpengaruh pada kurang lengkapnya laporan dalam pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan (Jurnal Treasury Indonesia, 2019). Hal tersebut misalnya pada tidak adanya menu ekspor dalam pengolahan data lebih lanjut seperti aplikasi dalam pelaksanaan anggaran (SAS). Berdasarkan aduan pada HAI DJPb, terdapat beberapa aduan SAKTI yang dikelompokkan dalam tiga aspek, yakni aspek administrasi, aspek pelaksanaan, hingga aspek pelaporan (HAI DJPb, 2019). Berikut merupakan tabel rekapitulasi aduan terkait implementasi SAKTI pada tahun 2018 kepada helpdesk.

Tabel 1. Aduan program sakti tahun 2018

Tabel 1 Aduan Program SAKTI Tahun 2018

Aspek	OK	Warning	Fail	Total
Administrasi	2182	8	4	2194
Pelaksanaan	451	14	9	474
Pelaporan	484	14	19	517

Sumber: HAI DJPb (2019)

Sumber : HAI DJPb (2019)

Adanya hambatan-hambatan yang ada pada implementasi program SAKTI, khususnya pada satuan kerja KPPN Klaten tentunya akan berpengaruh pada kualitas pelayanan, pembuatan keputusan, serta pelaporan keuangan. Hambatan dan permasalahan yang ada pada pelaksanaan SAKTI akan berpengaruh pada penyaluran APBN. Keberhasilan implementasi SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten seyogyanya sudah menjadi prioritas untuk mencapai pelayanan publik dan pengelolaan keuangan negara yang cepat, tangkas, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis mengenai agile governance pada program SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) pada satuan kerja KPPN Klaten karena merupakan suatu urgensi penting dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian penelitian dalam agile governance, khususnya pada pelaksanaan program SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian menampilkan hal-hal yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Secara garis besar metode penelitian

memaparkan penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian apakah penelitian merupakan penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Bagian ini juga memuat informasi mengenai deskripsi objek dan sample yang digunakan (responden/ profil kasus), metode pengumpulan data, ukuran sampel, dan metode analisis

2.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode tersebut dipilih karena data yang dihasilkan dalam penelitian berupa deskriptif atau kalimat tertulis maupun lisan yang berasal dari subjek penelitian (Hardani, 2020). Dalam desain penelitian kualitatif hanya memiliki peran dalam rancangan awal dan bersifat spekulatif. Dimana seluruh elemen yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dari apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang diperlukan di lapangan.

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga April 2023. Lokasi penelitian yang menjadi lokasi penelitian yakni pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten. Lokasi penelitian ini dipilih karena Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai penerapan agile governance dalam program SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) pada satuan kerja KPPN Klaten.

2.3 Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini terdiri dari informan utama dan informan penerima layanan. Informan utama terdiri dari Bapak Tedi Hendriyanto, S.E. selaku Analis Manajemen Satker sekaligus trainer SAKTI dari Seksi MSKI selaku bidang yang bertanggungjawab melakukan sosialisasi dan pengawasan SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten. Bapak Joko Hartanto, S.M. selaku Pejabat Fungsional sekaligus trainer SAKTI dari Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) KPPN Klaten. Bapak Dani Mei Nugroho, S.E. M.Si selaku operator SAKTI sekaligus pegawai Subbagian Umum KPPN Klaten (selaku pengguna anggaran rumah tangga yang mengakses SAKTI). Sedangkan, untuk informan penerima layanan berasal dari operator SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten, diantaranya Ibu Nur Aini selaku pegawai operator SAKTI pada Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Bapak Iswandi selaku operator SAKTI pada Badan Pusat Statistik Klaten, Ibu Nur Syamsiyah selaku operator SAKTI pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kabupaten Klaten, serta Bapak P. Agus Supriyanto selaku pegawai operator SAKTI pada Kantor Pajak Pratama Klaten.

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.

2.4.1 Wawancara

Menurut Moleong (2010 : 186), wawancara merupakan suatu kegiatan percakapan dengan tujuan tertentu dan dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditujukan pada pegawai KPPN Kabupaten Klaten, khususnya pada Seksi MSKI dan Subbagian Umum. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada beberapa satuan kerja KPPN Klaten, khususnya pegawai operator SAKTI.

2.4.2 Observasi Lapangan

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan suatu langkah yang penting dilakukan sebagai alat dalam menguatkan data dan memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengamati secara langsung dan objektif tentang keadaan yang sebenarnya terjadi (Basrofi & Suwandi, 2008:95). Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi partisipasi pasif, yakni peneliti melakukan pengamatan namun peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan di dalamnya.

2.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari data yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian, seperti arsip atau dokumen (Moleong, 2010:163). Dokumen dalam penelitian ini yang didapatkan penelitian berasal dari instansi terkait, media sosial, maupun media massa yang berhubungan dengan program SAKTI pada satuan kerja.

2.5 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi dalam menguji keabsahan data penelitian. Triangulasi dalam penelitian kualitatif dijelaskan sebagai suatu pengecekan data dari berbagai sumber melalui berbagai waktu dan cara (Sugiyono, 2009:273). Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber. Melalui triangulasi sumber, peneliti melakukan pengujian kredibilitas data dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber di KPPN Klaten. Data dari sumber-sumber yang telah didapatkan, kemudian dideskripsikan dan dikategorikan berdasarkan kesamaan serta perbedaannya. Data yang dianalisis oleh peneliti dapat menghasilkan suatu kesimpulan

2.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis interaktif dimana menghubungkan antara teori yang ada dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis interaktif memiliki empat tahapan dalam pelaksanaannya (Miles & Huberman, 1992:16-19).

2.6.1 Pengumpulan Data

Dalam langkah pengumpulan data, data dikumpulkan melalui proses observasi, wawancara, serta dokumentasi.

2.6.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah dalam pemilihan, pengabstrakan, serta penyederhanaan yang diperoleh dari hasil lapangan melalui tujuan yang telah diarahkan, dikelompokkan, serta pemilihan data yang tidak diperlukan yang pada akhirnya dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

2.6.3 Penyajian Data

Dalam penyajian data, peneliti melakukan penyusunan dari kumpulan informasi hasil reduksi. Selanjutnya, peneliti menyajikan informasi-informasi tersebut dalam suatu laporan yang dapat dipahami dan ditulis secara sistematis.

2.6.4 Penarikan Kesimpulan

Pada langkah penarikan kesimpulan peneliti menganalisis makna dari hasil atau data yang telah terkumpul. Selanjutnya, hasil tersebut akan disusun secara sistematis sebagai suatu informasi yang dapat dipahami dengan mudah. Data tersebut dibandingkan dengan data lainnya dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang sebelumnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Program SAKTI merupakan bentuk pengembangan dan kesatuan dari berbagai aplikasi pada tingkat satuan kerja yang sebelumnya telah dijalankan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan negara yang berbasis teknologi informasi. Program SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) hadir untuk menyempurnakan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya telah dilaksanakan pada proses pengelolaan keuangan satuan kerja KPPN Klaten. Setelah SAKTI dilaksanakan terdapat beberapa perubahan dalam pengelolaan keuangan satuan kerja KPPN Klaten, salah satunya adalah mendorong adanya nilai efisiensi, kemudahan, kecepatan, serta transparansi pada pengelolaan keuangan negara (*Jurnal Treasury Indonesia*, 2019).

Program SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara yang kemudian dijalankan oleh satuan kerja KPPN Klaten. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten merupakan bagian integral pelaksanaan SAKTI, yakni sebagai pengawas pelaksanaan SAKTI pada satuan kerjanya. KPPN Klaten yang beralamat di Jalan Koprak Sayom No.26 Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini dapat dijangkau dengan mudah karena lokasinya berada diantara Jalan Utama Solo-Jogjakarta dan Jalan Lingkar Solo-Jogjakarta.

Wilayah kerja KPPN Klaten secara teritorial meliputi dua kabupaten, yakni Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Sedangkan, wilayah kerja Kementerian / Lembaga yang menjadi wilayah kerja KPPN Kabupaten Klaten terdapat 74 satuan kerja. Terdapat 5 seksi bidang kegiatan pada KPPN Klaten, yakni Subbagian Umum, Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI), Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, serta Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Satuan kerja KPPN Klaten telah menjalankan program SAKTI selama kurang lebih satu tahun. Melalui adanya SAKTI dalam proses pengelolaan

keuangan saat ini, satuan kerja dituntut untuk dapat beradaptasi dan merespon lebih cepat atas perubahan teknologi yang ada guna menciptakan nilai yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah dalam proses bisnis pengelolaan keuangan negara saat ini. Melalui adanya SAKTI saat ini menjadi bentuk komitmen Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara yang agile (gesit). Berikut merupakan gambar yang menunjukkan adanya agile governance dalam program SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten.



Gambar 1. Agile Governance dalam Program SAKTI
Sumber : Peneliti (2023)

Agile governance dalam program SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) pada satuan kerja KPPN Klaten dianalisis menggunakan prinsip agile governance (tata kelola pemerintahan yang gesit) menurut Luna, A.J.H. de O (2015), yang terdiri dari good enough governance (konteks dan kapabilitas organisasi), business driven (berorientasi pada proses bisnis), human focused (berorientasi pada publik yang dilayani), based on quick wins (keberhasilan yang cepat), systematic and adaptive approach (aspek sistematis dan adaptasi), serta simple design and continuous refinement (desain sederhana dan capaian secara berkelanjutan).

Good enough governance sebagai salah satu prinsip yang digunakan dalam menganalisis tata kelola pemerintahan yang gesit dalam SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten. Prinsip ini berfokus pada kesesuaian aplikasi SAKTI dengan dengan kapabilitas instansi atau organisasi serta

mandat kebijakan. Dalam mewujudkan organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah berfokus pada sasaran yang berorientasi dengan hasil yang sesuai kebutuhan (Safroni, 2012).

Tata kelola organisasi dalam mencapai kelincuhan organisasi harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi, adanya keterlibatan dalam seluruh aspek, serta mempertimbangkan kondisi dalam suatu organisasi (Luna, et al, 2015). Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada satuan kerja KPPN Klaten dilaksanakan berdasarkan mandat kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Implementasi tersebut tentunya untuk menciptakan proses pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang baik dan efisien dengan memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini.

Pelaksanaan SAKTI dilakukan secara kolaboratif antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Republik Indonesia, KPPN Klaten, serta satuan kerja KPPN Klaten. Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki peran sebagai penggerak utama aplikasi SAKTI. Sedangkan, KPPN Klaten berperan dalam mengelola, menjalankan, serta melakukan sosialisasi dan pengawasan implementasi SAKTI kepada 74 satuan kerja KPPN Klaten. Selanjutnya, satuan kerja KPPN Klaten berperan sebagai user dalam mengakses SAKTI.

Dalam prinsip *good enough governance*, organisasi perlu menjadi perhatian dalam tata kelola, salah satunya mengenai kapabilitas organisasi yang memperhatikan aspek Sumber Daya Manusianya (Luna, et al, 2015). Kapasitas serta kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam implementasi SAKTI menjadi faktor yang penting untuk mencapai keberhasilan. Berdasarkan data yang diperoleh, pada awal implementasi SAKTI setiap satuan kerja KPPN Klaten telah menetapkan pegawai yang akan menjadi operator SAKTI dan disesuaikan dengan kondisi satuan kerja atau instansi tersebut. Pegawai yang diberi kewenangan sebagai operator SAKTI ditunjuk berdasarkan dengan kemampuan, kompetensi, serta tanggung jawabnya.

Terdapat pemetaan spesifikasi pegawai sebagai operator SAKTI yang disesuaikan dengan bidang atau seksi pegawai tersebut bekerja. Setiap operator SAKTI akan diberi akun untuk mengakses modul SAKTI guna melakukan proses pengelolaan keuangan.

Sayangnya, dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh, terdapat kendala pada tersediaan SDM yakni operator SAKTI pada beberapa satuan kerja KPPN Klaten saat awal implementasi SAKTI. Hal tersebut terjadi pada satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Klaten dan Madrasah. Kurangnya jumlah pegawai tersebut menyebabkan pegawai harus merangkap beberapa akun dalam SAKTI, akibatnya pekerjaan menjadi kurang teliti dan menumpuk. Kesiapan teknologi juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan SAKTI. Penyediaan komputer, laptop, serta jaringan internet dalam mengakses SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten dinilai telah baik. SAKTI yang merupakan aplikasi berbasis web kini tidak lagi memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi. Fokus infrastruktur satuan kerja KPPN Klaten dari segi teknologi saat ini justru berada pada penguatan jaringan internet untuk mendukung basis pengelolaan keuangan negara secara digital melalui SAKTI.

Adanya aplikasi SAKTI mampu mendukung nilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada satuan kerja KPPN Klaten. Hal tersebut diwujudkan melalui fitur *single database* yang dimilikinya. Melalui fitur *single database* proses monitoring, pengawasan, serta audit dapat dilakukan pada seluruh transaksi melalui SAKTI. Dari adanya keterbukaan tersebut, dapat mendeteksi sejak dini mengenai potensi penyelewengan atau masalah yang terjadi pada satuan kerja KPPN Klaten.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten telah sesuai dengan prinsip *good enough governance* pada teori *agile governance* yang dikembangkan oleh Luna, et al (2015). Hal tersebut dibuktikan dengan telah adanya daya dukung dari segi teknologi dan SDM, serta strategi untuk mewujudkan kelincahan dari organisasi.

Selain itu, implementasi dalam implementasi SAKTI juga terdapat keterlibatan dari seluruh aspek organisasi dan bersifat kolaboratif.

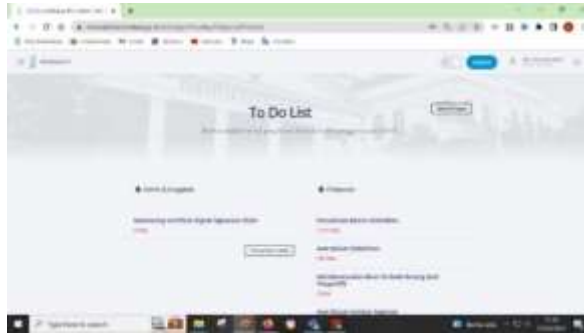
Prinsip agile governance yang kedua adalah business driven, yakni dalam setiap pengambilan keputusan organisasi harus mempertimbangkan business value atau nilai bisnis dari tindakan tersebut (Luna, et al, 2015). Menurut Cooke (2012), prinsip agility diimplementasikan melalui realisasi business value yang berkelanjutan dan memberi kepercayaan kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan proses bisnis tersebut. Selain itu, dalam pengelolaan program suatu organisasi juga diperlukan adanya peningkatan kualitas, manfaat, serta penerimaan suatu kelompok sebagai target.

Tujuan bisnis atau business value dalam implementasi SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten adalah guna mengintegrasikan database pada pengelolaan keuangan satuan kerja melalui fitur single database. Aplikasi SAKTI merupakan bentuk penyempurnaan dari aplikasi existing yang sebelumnya digunakan oleh satuan kerja KPPN Klaten. Melalui fitur single database yang mengintegrasikan seluruh data akan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, SAKTI juga mengoneksikan secara terarah proses keuangan dari mulai penganggaran, pembayaran, serta pelaporan.

Untuk mendukung kebermanfaatan dan kecepatan SAKTI dalam proses pengelolaan keuangan, terdapat aplikasi pendukung SAKTI yang bernama MONSAKTI (Monitoring SAKTI) yang didalamnya terdapat fitur deteksi transaksi atau pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh operator SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten. Selain itu, juga terdapat fitur warning untuk deteksi atas transaksi salah yang dilakukan oleh operator. Sehingga, melalui hal tersebut akan meminimalisir human error dalam pengelolaan keuangan negara.



Gambar 2. Tampilan MONSAKTI
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2023)



Gambar 3. Tampilan Fitur To Do List MONSAKTI
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2023)

Hasil penelitian diatas telah sesuai dengan prinsip business driven dalam teori agile governance yakni terdapat nilai kebermanfaatan dalam implementasi SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten, antara lain mengintegrasikan database, mempercepat proses pengelolaan keuangan, menciptakan nilai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, serta mengurangi adanya human error. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa prinsip business driven telah dilaksanakan dengan baik dalam implementasi SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten melalui peningkatan kemanfaatannya secara berkelanjutan.

Prinsip human focused pada agile governance digunakan untuk mengukur keterlibatan pegawai dalam aplikasi SAKTI. Menurut Luna, et al (2015), dalam prinsip human focused suatu organisasi perlu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai syarat dalam mendorong tujuan bisnis dan perubahan pada organisasi tersebut. Organisasi tentunya berorientasi pada pelayanan dan menfokuskan berbagai kebijakan atau program untuk perkembangan kondisi bagi kegiatan masyarakat (Safroni, 2012).

Human focused dalam implementasi SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten telah memberikan ruang bagi pegawai (satuan kerja) untuk berpartisipasi dan terlibat aktif. Keaktifan operator SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten ditunjukkan melalui keikutsertaan mereka dalam sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan SAKTI yang disebut dengan BIMTEK SAKTI. Kegiatan BIMTEK SAKTI telah diadakan sejak tahun 2021 sebagai media persiapan satuan kerja sebelum SAKTI diimplementasikan. Selain adanya pelatihan untuk pegawai operator pada satuan kerja KPPN Klaten, pelatihan juga diadakan bagi trainer SAKTI KPPN Klaten yang disebut dengan Training of Trainer (ToT) SAKTI. Hal ini dilakukan guna menciptakan trainer yang kompeten.



Gambar 4. Pelaksanaan BIMTEK SAKTI
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2023)

Selain melalui BIMTEK SAKTI, ruang partisipasi bagi satuan kerja KPPN Klaten juga berada pada layanan HAI CSO. Layanan HAI CSO merupakan layanan berbentuk web yang dapat diakses oleh seluruh operator SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten untuk melakukan konsultasi maupun pengaduan, serta memberikan masukan, saran, serta kritikan.



Gambar 5. Tampilan HAI CSO
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2023)



Gambar 6. Tampilan Kolom Konsultasi
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2023)

Selain melalui layanan online, KPPN Klaten juga melakukan layanan pengaduan dan konsultasi SAKTI secara langsung melalui CSO KPPN Klaten yang berada pada ruang front office. Layanan tersebut telah diakses dan dimanfaatkan dengan baik oleh operator SAKTI apabila mereka mendapatkan kendala. Selain itu, operator SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten juga secara

inisiatif telah berpartisipasi dalam pengembangan SAKTI melalui usulan fitur atau kemajuan SAKTI.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa implementasi SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten telah sesuai dengan prinsip human focused pada teori agile governance yang dikembangkan Luna, et al (2015). Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya keterlibatan pegawai, yakni operator SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten untuk berkontribusi. Selain itu, pihak KPPN Klaten juga memberikan ruang bagi pegawai satuan kerja, khususnya operator SAKTI untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan BIMTEK SAKTI dan layanan HAI CSO.

Agile governance sebagai paradigma baru dalam birokrasi dilaksanakan guna menciptakan adanya peningkatan struktur, kecepatan, serta proses dengan menekankan birokrasi yang sederhana, gesitm serta cepat (Cooke, 2012). Based on quick wins digunakan dalam mengukur kecepatan dan ketepatan implementasi SAKTI dalam proses pengelolaan keuangan. Kemenangan cepat harus dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dan dukungan yang harus diselesaikan (Luna, et al, 2015).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, diketahui bahwa operator SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten merasakan capaian atau dampak positif dari implementasi SAKTI dengan adanya percepatan dalam pengelolaan keuangan saat ini. Adanya simplifikasi dalam pembuatan SPM, LPJ, serta RPP yakni satuan kerja tidak lagi dituntut untuk datang langsung ke KPPN Klaten untuk melampirkan berkas, namun cukup memanfaatkan aplikasi yang dapat diakses dari kantor masing-masing secara online.

Dalam SAKTI terdapat fitur single entry point atau titik masuk tunggal yang memudahkan satuan kerja melakukan input data sebanyak satu kali saja. Melalui fitur single entry point juga dapat meningkatkan efisiensi waktu karena dalam melaksanakan transaksi pengelolaan keuangan, satuan kerja hanya cukup menginput data sebanyak satu poin dalam satu modul. Selain itu, guna mendukung percepatan pengelolaan keuangan melalui SAKTI dan sebagai salah satu upaya quickwins, KPPN Klaten melakukan perubahan pada ruang kerjanya, yakni dengan konsep fresh office.



Gambar 7. Satellite Office KPPN
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2023)

Salah satu konsep fresh office yang dimiliki KPPN Klaten adalah dengan tersedianya satellite office (S.O.) dengan dukungan komputer dan jaringan internet yang kuat dalam mendukung kecepatan akses penggunaan SAKTI. Salah satu keberhasilan SAKTI adalah dengan perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan negara pada awal masa implementasinya. Capaian tersebut membuktikan bahwa implementasi pada satuan kerja KPPN Klaten telah berhasil mencapai tujuan bisnisnya.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori agile governance menurut Luna et, al (2015), yakni pada prinsip based on quick wins. Melalui implementasi SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten terdapat adanya peningkatan kecepatan pada proses pengelolaan keuangan. Sedangkan, dari aspek keberhasilan SAKTI dibuktikan dengan predikat WTP yang didapatkannya.

Upaya menciptakan organisasi yang agile dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat adalah melalui penerapan nilai manfaat dan adanya cara kerja baru yang lebih adaptif, responsif, dan terbuka (Dhir & Sushil, 2018). Prinsip systematic and adaptive approach mengacu pada kemampuan intrinsik suatu tim dalam menangani perubahan yang sistematis (Luna, et al, 2014). Dalam hal ini organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan lingkungannya.

Satuan kerja KPPN Klaten secara adaptif dalam transisi pengelolaan keuangan melalui SAKTI. Sebelum SAKTI benar-benar diimplementasikan, operator SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten berlatih menggunakan server latihan yang disebut dengan PANDU SAKTI. PANDU SAKTI didesain hampir sama dengan aplikasi aslinya yang menampilkan 8 modul dalam SAKTI. Selain melalui server latihan, persiapan adaptasi juga dilakukan dengan adanya BIMTEK SAKTI, yakni kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten.

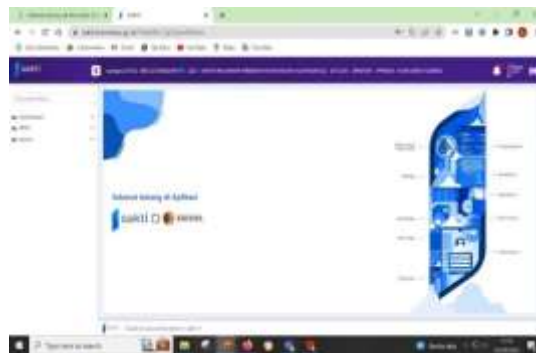
Selain itu, secara rutin trainer SAKTI dari KPPN Klaten juga melakukan monitoring dan evaluasi SAKTI selama 3 bulan sekali dengan mengunjungi kantor satuan kerja maupun melalui zoom meeting. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, didapatkan informasi bahwa masih terdapat kendala implementasi SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten, yakni gangguan maintenance dan gangguan jaringan internet. Namun, kendala tersebut tidak terlalu kerap terjadi pada satuan kerja KPPN Klaten. Dibalik kendala yang dihadapi, adanya SAKTI saat ini mampu menciptakan budaya kerja baru yakni paperless dan simplifikasi dalam pengelolaan keuangan karena semua serba digital. Selain itu, juga tercipta lingkungan kerja baru pada KPPN Klaten dengan konsep fresh office.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat prinsip systematic and adaptive approach yang dikembangkan Luna et, al (2015) dalam implementasi SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten. Terdapat upaya adaptasi dari KPPN Klaten maupun pegawai satuan kerja KPPN Klaten dalam menerima perubahan transisi pengelolaan keuangan negara menggunakan SAKTI. Selain itu, adanya aplikasi ini juga menciptakan budaya dan lingkungan kerja baru pada satuan kerja KPPN Klaten. Sehingga, dapat disimpulkan jika pelaksanaan SAKTI pada satuan kerja

KPPN Klaten telah dilakukan secara adaptif, sistematis, serta terdapat monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara optimal.

Disaat suatu organisasi memutuskan untuk menerapkan agile governance, diperlukan manajemen kinerja organisasi yang berfokus pada nilai inovasi dan percepatan secara berkelanjutan untuk mencapai hasil (Purwanto, 2019). Menciptakan layanan yang cepat, sederhana, serta efisien memerlukan perubahan dalam organisasi secara profesional. Prinsip simple design and continuous refinement dalam teori agile governance merupakan desain sederhana dan upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam mencapai penyempurnaan yang berkelanjutan (Luna, et al, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat perubahan dari adanya implementasi pada satuan kerja KPPN Klaten, yakni proses pengelolaan keuangan yang lebih terintegrasi dan efektif biaya, waktu, serta tenaga. Aplikasi SAKTI yang didesain berbasis web saat ini menciptakan adanya kemudahan aksesibilitas dalam proses pengelolaan keuangan bagi satuan kerja KPPN Klaten. Tampilan aplikasi SAKTI juga didesain sederhana dan menarik. Pada tampilan awal atau dashboard aplikasi, akan terdapat modul yang digunakan oleh operator SAKTI pada satuan kerja.



Gambar 8. Tampilan Dashboard SAKTI
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2023)

Adapun tampilan dashboard aplikasi SAKTI memiliki fitur Access Control List (ACL). Fitur tersebut akan mengelompokkan tampilan menu transaksi atau modul yang telah disesuaikan dengan kategori akun atau tugas dari setiap operator. Sehingga, melalui fitur tersebut akan mempercepat proses pengelolaan keuangan dan memudahkan operator dalam bekerja. Hingga saat ini SAKTI selalu mengalami perkembangan melalui penyempurnaan serta perbaikan fitur-fitur yang dimilikinya. Perkembangan SAKTI tersebut akan terus dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan bisnisnya.

Sehingga, dapat diketahui bahwa pelaksanaan SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten telah sesuai dengan prinsip simple design and continuous refinement. Hal tersebut telah dibuktikan melalui perkembangan SAKTI yang hingga saat ini masih dilakukan, sehingga menunjukkan adanya upaya penyempurnaan secara berkelanjutan. Selain itu, adanya fitur Access Control List (ACL) yang menunjukkan desain sederhana dan mudah dipahami oleh operator SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten. Serta, aplikasi SAKTI yang berbasis web

berpengaruh pada simplikasi dan percepatan aksesibilitasnya. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi SAKTI telah terdapat aspek kecepatan, kesederhanaan desain, serta perkembangan untuk mencapai penyempurnaan secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa agile governance dalam pelaksanaan SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten berjalan dengan baik dan berdampak positif dalam proses pengelolaan keuangan pada satuan kerja KPPN Klaten. Adapun prinsip-prinsip agile governance yang dikembangkan oleh Luna, et al (2015) yang telah terimplementasi dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, *good enough governance* (konteks dan kapabilitas organisasi). Secara kapabilitas organisasi, daya dukung dari segi teknologi dinilai telah berjalan dengan baik yakni adanya persediaan laptop, komputer, serta jaringan internet. Dari segi kapasitas Sumber Daya Manusia, pembagian operator SAKTI pada satuan kerja telah disesuaikan dengan spesifikasi tugas dan wewenang pegawai tersebut. Sayangnya, masih terdapat hambatan dari aspek ketersediaan SDM atau pegawai operator SAKTI pada satuan kerja Kementerian Agama KPPN Klaten. Meskipun demikian, SAKTI telah mampu mewujudkan kelincahan dalam organisasi, serta mewujudkan adanya transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan.

Kedua, *business driven* (berorientasi pada proses bisnis). Prinsip *business driven* telah berhasil dilaksanakan dengan baik dalam implementasi SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten karena melalui fitur-fitur yang dimilikinya. Hal tersebut berdampak positif pada database yang terintegrasi, percepatan dalam proses pengelolaan keuangan, adanya nilai efektivitas dan efisiensi, serta dapat mengurangi *human error*.

Ketiga, *human focused* (berorientasi pada publik yang dilayani). Pada pelaksanaan SAKTI telah berorientasi pada publik yakni dengan melibatkan seluruh pegawai operator SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten. Terdapat ruang partisipasi bagi pegawai satuan kerja, khususnya operator SAKTI dalam perkembangan SAKTI. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan BIMTEK SAKTI dan layanan HAI CSO. Selain itu, layanan HAI CSO juga dimanfaatkan dengan baik oleh operator SAKTI dalam menyampaikan usulan, masukan, melakukan konsultasi, serta pengaduan mengenai SAKTI.

Keempat, *based on quick wins* (keberhasilan yang cepat). Melalui fitur-fitur dalam SAKTI seperti *single entry point* atau titik masuk tunggal mendorong peningkatan kecepatan pada proses pengelolaan keuangan. Hal tersebut dirasakan oleh pegawai operator SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten yakni adanya simplifikasi dan efektivitas. Adapun aspek keberhasilan SAKTI sendiri pada awal masa implementasinya berhasil mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam proses pengelolaan keuangan negara.

Kelima, *systematic and adaptive approach* (aspek sistematis dan adaptif). Aspek sistematis telah dimulai dari sebelum pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada satuan kerja KPPN Klaten yakni dengan adanya

server latihan PANDU SAKTI. Selain itu, secara rutin trainer SAKTI juga melakukan monitoring dan evaluasi selama 3 bulan sekali pada satuan kerja KPPN Klaten. Dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut ditemukan kendala SAKTI yakni gangguan maintenance dan gangguan jaringan internet pada satuan kerja. Sedangkan, pada aspek adaptif adanya aplikasi ini mampu menciptakan budaya dan lingkungan kerja baru pada pengelolaan keuangan.

Terakhir, simple design and continuous refinement (desain sederhana dan capaian secara berkelanjutan). Terdapat upaya penyempurnaan aplikasi secara berkelanjutan. Selain itu, terdapat aspek kesederhanaan dalam tampilan SAKTI yang berada pada fitur access control list (ACL) dimana desktop atau tampilan awal aplikasi yang didesain sederhana dan mudah dipahami operator karena telah disesuaikan dengan kategori akunnya. Sedangkan, pada aspek kecepatan aplikasi ini didesain berbetuk web sehingga berpengaruh pada percepatan aksesibilitasnya.

Dengan demikian, agile governance dalam program SAKTI pada satuan kerja KPPN Klaten telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keenam prinsip yang berhasil dijalankan dalam pelaksanaan aplikasi, meskipun masih terdapat kendala pada prinsip good enough governance dan systematic and adaptive approach. Namun, melalui pelaksanaan aplikasi tersebut mampu menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan agile pada satuan kerja KPPN Klaten.

Referensi

- [1] Abdoellah, Awan. & Yudi Rusfiana. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- [2] Alexander, R. dkk. (2019). IT Governance and Its Agile Dimensions : Exploratory Research in the Banking Sector. Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences. 6215-6216.
- [3] Basrowi., & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta.
- [4] Beck, Kent. (2001). Agile Alliance : 12 Princip The Agile Manifesto.
- [5] Cooke, F. L. (2012). Human Resource Management in China : New Trends and Practices. London : Routledge.
- [6] Creswell, J. W. (2015). Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Nebraska : University of Nebraska.
- [7] Dhir, S., & Sushil. (2018). Flexible Strategies in VUCA Markets. Singapore : Springer.
- [8] Diamond, J., & Pokar K. (2005). Introducing Financial Management Information Systems in Developing Countries. International Monetary Fund.
- [9] Handayani, F., dkk. (2021). SAKTI : Innovation on Digitizing State Financial Management Web-Based in Indonesia. Journal Humanis (Humanities, Management, and Science Proceedings). 2(1).
- [10] Hardani., dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group.
- [11] Hasanah, N., & Sriyani. (2021). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPPN Palembang. Journal Publicuho. 4(3).
- [12] Holmqvist, M., & Kalevi P. (2006). Agility Through Scenario Development and Continuous Implementation : A Global Aftermarket Logistics Case. European Journal of Information Systems. 15, 147-150.

- [13] Janssen, M., & Haiko V. (2020). Agile and Adaptive Governance in Crisis Response : Lessons from the Covid-19 Pandemic. *International Journal of Information Management*. 3-5.
- [14] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- [15] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.
- [16] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.
- [17] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
- [18] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.